



## Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Desa Putun Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dedi Yohanis Otu<sup>1)</sup>, Frans Bapa Tokan<sup>2)</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

[dediotu111220@gmail.com](mailto:dediotu111220@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[frans.fisip@gmail.com](mailto:frans.fisip@gmail.com)<sup>2)</sup>

### Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat atau memampukan dan memandirikan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan kelompok tani yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan adalah untuk memanfaatkan secara lebih optimal semua daya yang tersedia serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Poktan) Di Desa Putun Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 (Tiga) Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan kelompok tani, kemudahan dalam akses permodalan, Bantuan pembangunan Sarana Prasarana, Pengembangan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa Putun belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya perhatian oleh pemerintah terhadap kelompok tani, kurangnya keaktifan dan keterlibatan pemerintah secara langsung untuk melihat kendala yang dialami oleh para kelompok tani, baik secara modal, maupun sarana dan prasarana pertanian serta pembagian bantuan yang belum merata bagi kelompok tani.

**Kata kunci:** Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Kelompok Tani

### Abstract

*Community empowerment is an effort made by the village government to increase the honor and dignity of layers of society or enable and make the community independent. With the empowerment of farmer groups developed by the government as a development tool, it is possible to make more optimal use of all available resources and improve the standard of living of the community. The aim of this research is to describe and analyze the role of the village government in empowering farmer groups (Poktan) in Putun Village, Nunkolo District, South Central Timor Regency. So the data analysis in this research is based on 3 (three) roles of the village government in empowering farmer groups, ease of use. access to capital, assistance for the construction of infrastructure, business development, marketing and business partnerships. The results of the research show that the role of the village government in empowering farmer groups in Putun village has not been implemented optimally due to the government's lack of attention to farmer groups, lack of activeness and direct government involvement. to see the obstacles experienced by farmer groups, both in terms of capital, agricultural facilities and infrastructure as well as the unequal distribution of aid for farmer groups.*

**Keyword:** Village Government, Empowerment, Farmer Groups



## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.Yang merujuk pada peraturan pemerintah No.47 Tahun 2015,pelaksanaan undang-undang tersebut pada pasal 1 ayat 1 memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan persyaratan yang diamanatkan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mempunyai kekuatan secara ekonomi, sosial, dan budaya melalui usaha-usaha pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Maka dengan lahirnya Undang-undang Desa tersebut, kewenangan Desa bersifrat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, campuran antara iself igoverning icommunity dan ilocal iself igoverment, bukan lagi sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local istate igoverment*).

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia. Pertanian juga memberikan sumbangsih yang konkrit dalam penggunaan bahan baku industry maupun penyerapan tenaga kerja yang nantinya akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga pelestarian lingkungan. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pesat, semakin besar pula kemungkinan kebutuhan manusia yang tidak terbatas untuk bisa terpenuhi. Khususnya bagi masyarakat pedesaan yang masih memiliki lahan pertanian dan tidak mempunyai keahlian lain ataupun golongan pendidikan masih minim maka secara tidak langsung untuk mencukupi kebutuhan dengan cara memanfaatkan lahan pertanian yang ada.

Kelompok tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang di bentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Pembentukan kelompok tani (Poktan) merupakan suatu usaha pembangunan pertanian yang berfungsi untuk memperlancar hasil pertanian dan memberikan wadah yang kokoh di pedesaan dan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama di antara para petani dalam kelompok untuk menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai kaitan erat dengan pendidikan nonformal. Pendekatan pendidikan nonformal didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan cara menggali dan menggunakan apa yang ada di masyarakat untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap, ketrampilan kearah kemandirian. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal dengan pendekatan kelompok atau *sosial grup work* untuk mengatasi masalah-masalah di atas ialah dengan program pemerintah dalam pembangunan pertanian dan pedesaan melalui kelompok tani. Pembentukan dan pengembangan kelompok tani di bentuk di desa-desa dengan menggunakan prinsip kemandirian local yang di capai melalui prinsip ke otonomian dan pemberdayaan. Kelompok tani menjadi lembaga penghubung antara petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain di luarnya. Kelompok tani (Poktan) memiliki fungsi-fungsi sebagai pemenuhan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan termasuk untuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh petani.

Di desa Putun Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat sepuluh kelompok tani (Poktan) Kelompok tani yang ada di Desa putun di bentuk atas dasar kesamaan tujuan dari para petani yaitu untuk meningkatkan produktivitas hasil panen.Kelompok tani ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Editing (Pemeriksaan Data, Classifying (Klarifikasi), Verifying (Verifikasi), Concluding (Kesimpulan). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah yakni: Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), Kesimpulan dan Verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar ada beberapa upaya pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Freeman Stoner & Gilbert (1998, pp. 126–128) dapat dilakukan sebagai berikut :

### 1. Kemudahan dalam akses permodalan

- a) Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha home industry, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha

- home industry. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor *home industry* yakni pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. Yang perlu dicermati dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor home industry melalui aspek permodalan ini adalah: Bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan.
- b) Bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan. Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif dalam hal ini perlu ada upaya untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi keberlangsungan dan peningkatan kinerja home industry. Selain itu perlu ada tindakan untuk melakukan penghapusan berbagai pungutan yang tidak tepat, keterpaduan kebijakan lintas sektoral, serta pengawasan dan pembelaan terhadap praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan didukung penyempurnaan perundang undangan serta pengembangan kelembagaan.
  - c) Bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem.

#### A. Menyediakan bantuan modal/keuangan

Pada tanggal 11 februari 2020 pemerintah desa putun di bentuk 10 kelompok tani, dari 10 kelompok tani tersebut yang berkerja sampai hari ini hanya ada 6 kelompok tani yaitu: Kelompok tani Membangun, sejahtera, Mol Baun, Tep Baun, Nekmese, Kae Bunu sedangkan 4 kelompok tani sudah fakum yaitu: kelompok tani Tetus, Fetomone, sehati, Teon Tuan dari. Pemerintah desa menyediakan modal memang tidak ada tetapi kalau modal berupa barang dan alat bantu kerja ada dari pemerintah desa. berkisar mencapai 45.000.000. Bantuan barang yaitu Kultifator, Fiber, selang, ember, linggis, dan tengki semprot. Namun bantuan yang di berikan biasanya tidak di manfaatkan dengan baik, banyak yang sekedar mengambil bibit atau pupuk tapi tidak di gunakan bahkan hanya disimpan di rumah sendiri.

Hasil wawancara dari salah satu informan yang di temui oleh peneliti dapat di simpulkan bahwa bantuan yang diberikan kemasyarakat berjalan dengan efektif hanya saja bantuan yang di salurkan pemerintah tidak jarang di abaikan atau tidak dimanfaatkan dengan semestinya oleh masyarakat petani.

Modal dari dinas pertanian melalui penyuluh pertanian memang ada namun bantuan modal dalam bentuk barang bukan keuangan yaitu kultifator, fiber, selang, ember, linggis, waring, dan tengki semprot. Beliau juga mengatakan bantuan itu hanya beberapa kelompok saja, karena dari 10 kelompok tani di desa putun hanya 6 kelompok tani saja yang menerima bantuan tersebut sedangkan 4 kelompok tani sudah fakum karena masyarakat lebih memilih bekerja di lahan sendiri dari pada di lahan kelompok tani tersebut. namun bantuan yang di berikan biasanya tidak di manfaatkan dengan baik, banyak yang sekedar mengambil bibit atau pupuk tapi tidak di gunakan bahkan hanya disimpan di rumah sendiri.

Dari hasil wawancara dengan bapak penyuluh pertanian Migel dapat disimpulkan bahwasannya peranan pemerintah desa sebagai pemberdayaan petani ialah melalui pemberian fasilitas bantuan modal/keuangan kepada setiap kegiatan pembangunan pertanian berupa pengadaan yaitu Kultifator, Fiber, selang, ember, linggis, dan tengki semprot semuanya berkisaran Rp 45.000.000. Namun bantuan yang diberikan kemasyarakat berjalan dengan efektif hanya saja bantuan yang di salurkan pemerintah tidak jarang di abaikan atau tidak dimanfaatkan dengan semestinya oleh masyarakat petani.

Berdasarkan pernyataan yang di dapatkan peneliti saat mewawancarai salah satu informan dapat diketahui bahwa bantuan pemerintah sudah bisa dikatakan cukup baik dan sampai kemasyarakat namun beberapa bantuan pemerintah yang di berikan kepada masyarkat tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat petani bahkan ada beberapa yang dibiarkan begitu saja oleh masyarakat tanpa di pergunakan dengan baik, selain daripada hal tersebut juga alasan masyarakat tidak menggunakan dengan bantuan yang diberikan karena ketidak sesuaian bantuan dengan kebutuhan masyarakat seperti masala bibit yang berpenyakit atau bibit sudah rusak sehingga jika itu di tanam oleh masyarakat sama hal membuang-buang tenaga karena hasilnya hanya bisa sampai setengahnya saja dari keseluruhan bibit yang ditanam.

## B. Menyediakan akses pemasaran untuk hasil pertanian

Akses dari pemerintah desa putun sekarang kita lihat semua Karena BumDes sementara fakum jadi mereka di pasarkan saja di pasar local yang ada di kecamatan sampai kabupaten sedangkan yang kita lihat pasar local yang ada dari sejak Nenek moyang sampai sekarang dan bisalah untuk masyarakat menjual hasil pertanian walaupun 1 minggu 1 kali pemasaran.

Dari keterangan yang di sampaikan informan setelah diwawancarai dapat kita ditarik suatu kesimpulan bahwa pihak pemerintah belum bekerja sama dengan kelompok tani terkait akses untuk pemasaran hasil pertanian sehingga masyarakat pertanian harus menjual hasil pertanian dipasar yang ada dikabupaten. Tidak memikirkan mau kemanakan hasil pertaniannya. Namun pemerintah desa mengatakan bahwa ada pasar local walaupun satu minggu 1 kali pemasaran namun tersedia untuk kelompok tani bisa menjual hasil pertaniannya.

Memang belum ada istilah orang pertanian dengan orang elit ekonomi yang istilah pemasarannya harus hasil harus keluar melalui satu pintu dan masuk melalui satu pintu tetapi dengan upaya kelompok kami bisa mengumpulkan hasil dan mencoba menggaling informasi di pasar sehingga harga memungkinkan maka kami lepas melalui kelompok yang istilahnya ada paying hukum yang melindungi usaha petani.

Dari keterangan yang di sampaikan informan setelah diwawancarai dapat kita ditarik suatu kesimpulan bahwa pihak pemerintah belum bekerja sama dengan kelompok tani terkait akses untuk pemasaran hasil pertanian sehingga masyarakat pertanian harus menjual hasil pertanian dipasar yang ada dikabupaten. Penyataan ini juga sama dengan ketua dan anggota-anggota kelompok tani lainnya karena semua belum terlaksana oleh pemerintah desa putun kepada Masyarakat kelompok tani.

Lebih lanjut Berdasarkan dari beberapa keterangan informan yang telah di wawancarai oleh peneliti berkaitan dengan aspek penyediaan akses pemasaran untuk hasil pertanian maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah selaku penyedia layanan bagi masyarakat belum mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik, dengan demikian masyarakat belum merasakan berbagai bentuk bantuan pemerintah yang diberikan tersebut juga secara keseluruhan sampai kepada masyarakat petani, meskipun ada beberapa ada 1 akses pemasaran yang berdiri sejak nenek moyang.

## 2. Bantuan pembangunan sarana dan prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil pemasarannya tidak dapat dipasarkan, atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah.

### A. Penyediaan sarana berupa traktor dan pompa air

Ada bantuan juga dari kami sebagai pemerintah desa alat yang kami sediakan yaitu kultifator sebagai alat bantu kerja dan fiber, selang bahkan ember saja kami sediakan kepada kelompok tani yang mau untuk berkerja. Namun bantuan yang di berikan biasanya tidak dimanfaatkan dengan baik, banyak yang sekedar mengambil bibit atau pupuk tapi tidak di gunakan bahkan hanya disimpan di rumah sendiri.

Hasil wawancara dari salah satu informan yang di temui oleh Kepala Desa peneliti dapat di simpulkan bahwa bantuan yang diberikan kemasyarakat berjalan dengan efektif hanya saja bantuan yang di salurkan pemerintah tidak jarang di abaikan atau tidak dimanfaatkan dengan semestinya oleh masyarakat petani. Tidak ada upaya atau bantuan dari pemerintah desa mengenai sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian kami hanya menggunakan ilmu dan teknologi yang diberikan dari penyuluh pertanian dan alat bantu kerja dari penyuluh pertanian.

Berdasarkan dari keterangan yang di sampaikan informan setelah diwawancarai dapat kita ditarik suatu kesimpulan bahwa bantuan dari pemerintah telah berjalan dengan baik namun belum maksimal dirasakan petani yang membutuhkannya. Dikarenakan bantuan tersebut hanya di satu kelompok saja padahal kelompok yang lain juga membutuhkannya maka dari itu Pemerintah desa mengambil peran dalam mengarahkan kepada setiap penyuluh pertanian lapangan dalam pembagian batuan kepada kelompok tani yang ada di Desa Putun agar produksi hasil pertanian dapat meningkat. Saya dan anggota lain merima bantuan pupuk dan bibit biasa juga alat pertanian tapi pupuk yang di berikan biasa saya simpan di rumah karena tidak tahu cara pakainya bagaimana takarannya serta gunanya untuk apa jadi kusimpan saja di rumah, bibit juga biasa saya simpan di rumah kadang tidak

di tanam sampai mati sendiri karena bibitnya kurang subur dan kalo di tanam hanya buang-buang tenaga karena bibitnya banyak yang sudah rusak jadi kalau kami tanam biasa hanya setengahnya saja yang tumbuh sehingga kami harus kerja dua kali untuk tutupi yang mati.

Berdasarkan pernyataan yang di dapatkan peneliti saat mewawancarai salah satu informan dapat diketahui bahwa bantuan pemerintah sudah bisa dikatakan cukup baik dan sampai kemasyarakat namun beberapa bantuan pemerintah yang di berikan kepada masyarakat tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat petani bahkan ada beberapa yang dibiarkan begitu saja oleh masyarakat tanpa di pergunakan dengan baik, selain daripada hal tersebut juga alasan masyarakat tidak menggunakan dengan bantuan yang diberikan karena ketidak sesuaian bantuan dengan kebutuhan masyarakat seperti masala bibit yang berpenyakit atau bibit sudah rusak sehingga jika itu di tanam oleh masyarakat sama hal membuang-buang tenaga karena hasilnya hanya bisa sampai setengahnya saja dari keseluruhan bibit yang ditanam.

Lebih lanjut Berdasarkan dari beberapa keterangan informan yang telah di wawancarai oleh peneliti berkaitan dengan aspek penyediaan sarana bibit, pupuk, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah selaku penyedia layanan bagi masyarakat sudah mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik, dengan demikian masyarakat sudah merasakan berbagai bentuk bantuan pemerintah yang diberikan tersebut juga secara keseluruhan sampai kepada masyarakat petani, meskipun ada beberapa bantuan yang secara kualitas belum bisa di katakan baik karena ada beberapa bantuan seperti bibit yang tak jarang kurang subur sampai kemasyarakat karena proses penyaluran pemerintah yang jauh dari pusat ke daerah menjadi salah satu faktor sehingga bibit yang sampai ke masyarakat kurang subur lagi sementara pada saat belum disalurkan ke masyarakat petani bibit-bibit itu masih normal dan subur.

#### **B. Penyediaan prasarana berupa lahan untuk pembukaan pasar, pembukaan jalan usaha tani, irigasi pertanian, dan penyediaan lahan bagi kelompok tani (Poktan)**

Kami dari pemerintah desa memang penyediaan lahan untuk pasar tidak ada tetapi yang kita lihat pasar yang sudah berdiri dari tahun kita pu nene moyang dan sampai sekarang. Beliau juga mengatakan bahwa jalan usaha tani tidak ada dari pemerintah, irigasi juga pertanian juga tidak ada, dan penyediaan lahan untuk kelompok tani tidak ada karena masing-masing ada lahan sendiri karena pemerintah desa tidak ada lahan.

Dapat disimpulkan Ketersediaan prasarana. Minimnya akses jalan dimana infrastruktur jalan usaha tani tidak layak digunakan banyak genangan air dan kubangan saat hujan datang. Transportasi juga sulit kami didapatkan terutama kelompok tani yang mau memanen hasil pertaniannya harus pikul dan berjalan kaki sekitar 1-2km.

Berupa Lahan Untuk Pembukaan Pasar, Pembukaan Jalan Usaha Tani, Irigasi Pertanian, Dan Penyediaan Lahan Bagi Kelompok Tani memang tidak ada karena masing-masing kelompok tani punya lahan sendiri dan soal irigasi juga tidak ada begitu pun jalan usaha tani tidak ada.

Berdasarkan wawancara peneliti dapat disimpulkan Ketersediaan prasarana pertanian khususnya irigasi pertanian Masyarakat petani sangat membutuhannya. Minimnya akses jalan dimana infrastruktur jalan usaha tani tidak layak digunakan banyak genangan air dan kubangan saat hujan datang. Transportasi juga sulit kami didapatkan terutama kelompok tani yang mau memanen hasil pertaniannya harus pikul dan berjalan kaki sekitar 1-2km. pernyataan ini juga sama dengan ketua dan anggota-anggota kelompok tani lainnya karena semua belum terlaksana oleh pemerintah desa putun kepada Masyarakat kelompok tani.

Lebih lanjut Berdasarkan dari beberapa keterangan informan yang telah di wawancarai oleh peneliti berkaitan dengan aspek penyediaan Penyediaan Prasana Berupa Lahan Untuk Pembukaan Pasar, Pembukaan Jalan Usaha Tani, Irigasi Pertanian, Dan Penyediaan Lahan Bagi Kelompok Tani maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah selaku penyedia layanan bagi masyarakat belum mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik, dengan demikian masyarakat belum merasakan berbagai bentuk bantuan pemerintah yang diberikan tersebut juga secara keseluruhan sampai kepada masyarakat petani.

### **3. Pengembangan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha**

Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam

pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangan kluster. Selain jaringan usaha, jaringan pemasaran juga menjadi salah satu kendala yang selama ini juga menjadi faktor penghambat bagi *home industry* untuk berkembang. Upaya pengembangan jaringan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi misalnya melakukan kerja sama dengan berbagai pusat-pusat informasi bisnis, asosiasi-asosiasi dagang, pendirian dan pembentukan pusat-pusat data bisnis *home industry*.

#### **A. Pengembangan usaha berupa kemampuan modal, strategi pengembangan usaha, pengembangan sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan**

Dari kami pemerintah desa ada sosialisasi untuk kelompok tani dan itu pun setahun dia berproses kalau ABPDES di prioritas untuk kelompok tani tetapi misalnya tahun lalu yang covid19 dan uang semua di alihkan di yang lain sebagainya dan itupun pertanian di abaikan. Dan beliau juga mengatakan bahwa sosialisasi terkait pengembangan usaha, pengembangan sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan setahun 1 kali karena ABPES dia satu tahun 1 kali.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan yang ditemui dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi di masyarakat kelompok tani masih jauh dari harapan dilihat dari jumlah sosialisasi yang di adakan oleh pemerintah yang sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan pengetahuan petani yang harusnya butuh banyak diadakan sosialisasi.

Selama ini mengenai pengembangan usaha pertanian tidak pernah ada dari pemerintah desa. Tetapi yang ada hanya dari penyuluh pertanian mengenai saran bagaimana cara tanam, pemberian pupuk, pemeliharaan, penyiangan, sehingga dengan bantuan dari penyuluh kami lakukan dan hasilnya seperti ini.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan yang ditemui dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan di masyarakat kelompok tani masih jauh dari harapan dilihat dari jumlah pelatihan yang di adakan oleh pemerintah yang sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan pengetahuan petani yang harusnya butuh banyak diadakan pelatihan.

Sehingga berdasarkan keterangan dari beberapa informan yang bersangkutan terkait dengan aspek pengembangan usaha berupa kemampuan modal, strategi pengembangan usaha, pengembangan sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan dapat disimpulkan bahwa pada pemerintah masih kurang aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dilihat dari pernyataan oleh beberapa informan. Kurang aktifnya pemerintah dalam hal memberikan pelatihan kepada masyarakat karena kurangnya sinergitas dan kerjasama antara pemerintah desa dengan kabupaten yang kemudian menjadikan pemerintah desa sendiri kurang dilibatkan dalam melakukan pelatihan kepada masyarakat petani di daerahnya sendiri, sehingga pada aspek ini pemerintah dikatakan tidak berhasil dalam melaksanakan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat kelompok tani petani.

#### **B. Pemasaran usaha berupa penyediaan produk yang berkualitas, lokasi pasar strategis, kekuatan modal dan promosi**

Kami pemerintah desa tidak pernah melakukan promosi terkait hasil kelompok tani, kalau dokumentasi sudah tapi tidak promosikan. kalau pasar yang tadi saya katakan ini pasar berdiri dari sejak nenek moyang sampe sekarang walaupun 1 minggu 1 kali.

Dari keterangan yang di sampaikan informan setelah diwawancarai dapat kita ditarik suatu kesimpulan bahwa pihak pemerintah belum bekerja sama dengan kelompok tani terkait promosi hasil pertanian sehingga masyarakat tidak memikirkan mau kemanakan hasil pertaniannya.

Mengenai pemasaran dan kemitraan usaha Tidak ada dari pemerintah desa yang membantu untuk pemasaran namun dari kelompok tani sendiri mengumpulkan hasil dan mencoba mencari informasi mengenai harga dan melakukan penjualan. Lanjutnya beliau mengatakan mengenai promosi hasil pertanian belum dibuat ditingkat desa, manun petani biasa mengikuti pameran di tingkat kabupaten. Disana juga pemerintah desa melakukan akumulasi komoditi yang biasa menjangkau pasar walaupun hanya disepertaran pasar tradisional dan itu juga kami sudah menganggapnya sebagai suatu promosi atau iklan karena komoditi kacang merah ini nilai gizi dan nilai jualnya bagus.

Berdasarkan dari keterangan yang di sampaikan informan setelah diwawancarai dapat



kita ditarik suatu kesimpulan bahwa pihak pemerintah harus lebih memperhatikan kelompok tani dalam hal promosikan hasil pertanian sehingga kelompok tani tidak memikirkan untuk hasil pertaniannya mau kemanakan karena itulah yang diharapkan kelompok tani kepada pemerintah Desa. Pernyataan ini juga sama dengan ketua dan anggota-anggota kelompok tani lainnya karena semua belum terlaksana oleh pemerintah desa putun kepada Masyarakat kelompok tani.

Lebih lanjut Berdasarkan dari beberapa keterangan informan yang telah di wawancarai oleh peneliti berkaitan dengan aspek Pemasaran Usaha Berupa Penyediaan Produk Yang Berkualitas, lokasi pasar strategis kekuatan modal dan promosi maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah selaku penyedia layanan bagi masyarakat belum mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik, dengan demikian masyarakat belum merasakan berbagai bentuk bantuan pemerintah yang diberikan tersebut juga secara keseluruhan sampai kepada masyarakat petani.

Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi: hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan tabel atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal. Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan temuan dari penelitian kedalam kumpulan pengetahuan yang telah ada dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Putun Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan belum berjalan dengan baik dikarenakan belum adanya pemerataan dalam pelayanan terhadap kesejahteraan kelompok tani yang ada di desa putun kecamatan nunkolo kabupaten timor tengah selatan yang dibuktikan dengan hasil wawancara yang ada.

#### **1. Aspek Kemudahan dalam akses permodalan**

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Aspek Kemudahan dalam akses permodalan di desa putun belum tersalurkan dengan baik karena ada beberapa kelompok tani yang tidak menerima bantuan permodalan dari pemerintah desa. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan terhadap pemberdayaan kelompok tani di desa putun.

#### **2. Aspek bantuan pembangunan sarana dan prasarana**

Menyangkut hal sarana dan prasarana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani menurut hasil penelitian dan wawancara yang ada bahwa dalam hal bantuan pembangunan sarana dan prasarana terhadap kelompok tani yang menyangkut prasarana berupa lahan pembukaan pasar, pembukaan jalan usaha tani, irigasi pertanian dan lahan pertanian tidak di laksanakan oleh pemerintah desa.

#### **3. Aspek pengembangan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha**

Untuk pengembangan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha dalam hasil wawancara bahwa dalam indikator ini pemerintah desa tidak ikut serta dalam pengembangan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha tetapi upaya sendiri dari kelompok tani masing-masing untuk memasarkan hasil pertanian tersebut

### **SARAN**

1. Untuk Pemerintah Desa kiranya dalam pemberian sosialisasi program terhadap petani lebih digiatkan lagi, serta tepat sasaran agar petani dapat bekerja dengan baik. Untuk pelatihan kiranya juga dapat diperhatikan dengan baik serta pemberian bantuan kiranya dapat diberikan secara merata agar tidak terjadi persaingan dalam bertani.

2. Diperlukan keaktifan dan pertahian yang lebih dari Pemerintah Desa untuk melihat dan memenuhi setiap

3. Keperluan kelompok tani, seperti mampu penyediaan fasilitas serta pemberian bantuan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok tani agar dapat meningkatkan kapasitas bertani serta hasil pertanian dapat lebih banyak dan lebih menjanjikan.

4. Untuk Kelompok Tani kiranya kekompakan lebih ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan kinerja secara bersama-sama guna mencapai tujuan bersama dalam kesejahteraan anggota kelompok tani.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Liwu & Cahyo Sasmito. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *JISIP - Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unitri*, 8(4), 228–233. <https://Publikasi.Unitri.Ac.Id/Index.Php/Fisip/Article/View/1952>
- Andi Meuthia. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perahu Pinisi Di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Andi Nubu & Muhammad Mattalitti. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *Parabela : Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 1(2), 77–99.
- Ardial. (2014). *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*. PT Bumi Aksara.
- Baharuddin Tahir. (2019). Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 91–102. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909>
- Devi Putra Hasnedi. (2017). *Evaluasi Standar Pelayanan Puskesmas Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga (Studi Pengendalian Masalah Kesehatan)*. Universitas Islam Riau.
- Dwi Iriani Margayaningsih. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Freeman Stoner & Gilbert. (1998). *Manajemen Industri Kecil*. Prehallindo.
- Garda Try Ananda. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Corporate Social Responsibility Pt. Indonesia Power Di Kampung Sentra Batik Alam Semarang* [Universitas Diponegoro Semarang]. [http://eprints.undip.ac.id/73907/2/BAB\\_1.Pdf](http://eprints.undip.ac.id/73907/2/BAB_1.Pdf)
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. UMM Press : Malang.
- Hasan M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Iqbal Herdiansyah. (2019). *Pemberdayaan Berkelanjutan: Potret Pemberdayaan LSM Swaraowa Di Masyarakat Hutan Sokokembang* [Universitas Diponegoro]. [http://eprints.undip.ac.id/75261/4/BAB\\_III.Pdf](http://eprints.undip.ac.id/75261/4/BAB_III.Pdf)
- Karbulah, Et, A. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 3(1), 90–113.
- Kiki Endah. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Lasiman Sugiri. (2019). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Publica*, 2(1).
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Matthew Miles, M. H. Dan S. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). UI Press.
- Mujian. (2017). *Peranan Pemerintah Kelurahan Batu Teritip Dalam Pelayanan Umum Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai*. Universitas Islam Riau.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Nekky Rahmiyati, Et, Al. (2015). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Di Kota Mojokerto. *Jmm17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2). <https://doi.org/10.30996/jmm17.v2i02.506>
- Nurul Hasmi Aprilliana, Et, Al. (2021). Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Bontomarannu Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2), 694–710. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Rudi Hermawan. (2016). *Peran Gabungan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Kulwaru Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiyono. (2009). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suryana. (2019). Model Pemberdayaan Pendidikan Non Formal (Pnf) Dalam Kajian Kebijakan Pendidikan. *Edukasi*, 13(2), 1–12.
- Tri Handayani. (2017). *Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kopi Pada Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) Dalam Mengurangi Pengangguran Di Desa Gesing , Kecamatan Kandangan , Kabupaten Temanggung*. Universitas Negeri Semarang.
- Ulber Silalahi. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama.
- Ulfu Putra Sany. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1). <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989>